

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

##### **4.1.1 Sejarah Kabupaten Sidoarjo**

Sidoarjo merupakan pusat Kerajaan Jenggala yang ada pada masa kolonialisme Hindia Belanda dikenal dengan nama Sidokare. Sidokare yakni bagian dari wilayah kabupaten Surabaya. Surabaya pada masa dahulu yakni kabupaten atas kuasa kolonialisme Hindia Belanda hingga pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda memutuskan buat memisahkan wilayah kabupaten sidoarjo buat jadi 2 wilayah yakni Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Perihal ini tertuang dalam keputusan pemerintah Hindia Belanda Nomor. 9/ 1859 bertepatan pada 31 Januari 1859 Staatblad Nomor. 6, pada dikala itu Sidokare dipandu oleh R. Notopuro yang setelah itu diberi gelar R. T. P. Tjokronegoro. Dia adalah putra dari R. A. P. Tjokronegoro yang yakni Bupati Surabaya. Kabupaten Sidokare ditukar namanya jadi Kabupaten Sidoarjo dengan alibi jika nama Sidokare kurang memiliki makna yang bagus. Hingga pada tahun 1862 R. T. P. Tjokronegoro wafat dan kepemimpinan kabupaten Sidoarjo diserahkan kepada R. T. A. A. Tjokronegoro II yang yakni kakak dari R. T. P. Tjokronegoro. R. T. A. A. Tjokronegoro II sebelumnya tinggal di Lamongan, ia menetap di Kabupaten Sidoarjo sehabis menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1863. Pada tahun 1883, Bupati Tjokronegoro pensiun dan digantikan oleh R. P. Sumodiredjo yang yakni pindahan dari Tulungagung. Namun sehabis menjabat 3 bulan ia wafat dan sehabis itu R. A. A. T. Tjondronegoro I diangkat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1883 mengambil alih R. P Sumodiredjo.

Jepang pula menguasai sebagian wilayah kabupaten Sidoarjo sejak 8 Maret 1942- 15 Agustus 1945. Terdapat pula wilayah yang dimengerti oleh militer Jepang ialah Delta Sungai Brantas. Pada bersamaan pada 15 Agustus

1945, Jepang menyerah pada sekutu serta daerah Sungai Brantas mulai dipahami oleh Belanda. Pada dini bulan Maret 1946 militer Belanda senantiasa berupaya menduduki daerah Sungai Brantas serta kala Belanda sukses memahami daerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahannya ke Porong. Belanda terus melaksanakan penjajahan di kabupaten Sidoarjo serta memperluas daerah kekuasaannya. Kecamatan Sukodono yang dikala itu diketahui dengan nama Dungus ialah daerah yang diperebutkan Belanda. Sampai pada tahun 24 Desember 1946 Belanda melanda kabupaten Sidoarjo dengan sebagian serbuan sampai daerah Tulangan. Serta kabupaten Sidoarjo jatuh pada kekuasaan Belanda. Pusat pemerintahan Sidoarjo berpindah ke wilayah Jombang sampai pada November 1948, Negeri Jawa Timur dibangun serta dinyatakan selaku salah satu negeri bagian Republik Indonesia Serikat. Pada pemerinthaan Belanda yang diketahui dengan istilah Recomba, berupaya membentuk kembali pemerintahan Belanda semacam masa kolonial Belanda pada era dulu. Serta Sidoarjo terletak dibawah pemerintahan Recomba sampai tahun 1949. Pada tahun 1949 lebih tepatnya bertepatan pada 27 Desember 1949, kesepakatan Konferensi Meja Bulat dibangun serta sudah menciptakan vonis kalau Belanda kembali menyerahkan Negeri Jawa Timur kepada Republik Indonesia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sidoarjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo). Sejarah diakses pada tanggal 1 September 2020, Pukul: 12.37 WIB.

#### 4.1.2 Makna Lambang Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.1. Lambang Kabupaten Sidoarjo



Arti lambang wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 5( 5), ialah:

1. Bentuk segilima beraturan dengan sisi- sisinya yang berupa kurung kurawal yang melambangkan falsafah Pancasila yang berarti jika warga Kabupaten Sidoarjo sudah menetapi serta mempraktikkan ajaran pancasila dengan tertib serta pasti.
2. Bintang yang bersudut 5 melambangkan ke- Tuhan- an Yang Maha Esa, ini menggambarkan kalau masyarakat Kabupaten Sidoarjo BerkeTuhan- an serta Beragama.
3. Setangkai padi denga 8 belas butir serta sebatang tebu 5 ruas dengan wujud bundar melambangkan hasil bumi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebaliknya lambang yang berupa bundar dari tebu serta padi tersebut menggambarkan kalau pemerintah mempunyai tekad yang bundar buat membangun warga yang adil serta makmur. Serta 18( 8 belas) butir padi tersebut menampilkan banyaknya Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
4. Ikan udang serta Ikan bandeng yang membentuk huruf“ S” melambangkan hasil tambak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Wujud“ S” dari ikan udang serta ikan bandeng ialah wujud huruf awal dari nama Kabupaten Sidoarjo.

Warna dari lambang daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki arti, yakni:

1. Warna biru laut yang ada pada lambang memiliki arti air, yang menggambarkan daerah kabupaten Sidoarjo yang dulu dikenal dengan nama: “DELTA BRANTAS” tersebut dikelilingi air yakni sungai dan laut. Warna biru laut yang terlepas dalam bundaran tebu dan padi memiliki arti air yang menggambarkan daerah kabupaten Sidoarjo ialah daerah tambak yang menghasilkan ikan udang dan ikan bandeng.
2. Warna hijau pada dasar lambang menggambarkan kesuburan daerah kabupaten Sidoarjo tepatnya di wilayah Delta Brantas.
3. Warna kuning pada lambang bintang, tebu, pita, dan padi menggambarkan kesejahteraan rakyat kabupaten Sidoarjo.
4. Warna hitam pada lambang tebu, ikan bandeng, ikan udang dan pada tulisan kabupaten Sidoarjo menggambarkan keteguhan Iman rakyat daerah kabupaten Sidoarjo.
5. Warna abu-abu pada lambang ikan udang dan ikan bandeng ialah sebagai warna pernak-pernik.

#### **4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo yakni salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana ibu kotanya terletak di Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo yakni kabupaten yang dihimpit oleh 2 sungai yakni, sungai Porong dan sungai Surabaya. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' di Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' di Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan dari kabupaten Sidoarjo seluas 71. 424, 25 Ha. Kabupaten Sidoarjo pula memiliki wilayah dengan karakteristik tertentu, karakteristik yang dimiliki kabupaten Sidoarjo antara lain dipecah ke dalam 3 wilayah. Dini, daerah dengan prosentase 40, 81% yang letaknya di daerah bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang terletak di sisi timur dengan prosentase 29, 99% yakni daerah tepi laut dan pertambakan. Terakhir ialah daerah di bagian barat dengan prosentase wilayah sebesar 29, 20%.

#### **4.1.4 Kondisi Demografis Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan dengan jumlah penduduk 194.051 jiwa, dengan jumlah jenis kelamin laki 95.885 jiwa dan jenis kelamin perempuan 98.166 jiwa. Kecamatan Buduran memiliki jumlah penduduk 92.334 jiwa( laki- laki 92.334 jiwa dan perempuan 46.901 jiwa). Kecamatan Candi dengan jumlah penduduk 145.146 (laki- laki 72.283 jiwa dan perempuan 72.863). Kecamatan Porong dengan jumlah penduduk 65.909 jiwa( laki- laki 33.771 jiwa dan perempuan 32.138 jiwa). Kecamatan Krembung dengan jumlah penduduk 58.358 jiwa (laki- laki 29.183 dan perempuan 29.175). Kecamatan Tulangan dengan jumlah penduduk 87.422( laki- laki 43.982 jiwa dan perempuan 43.440 jiwa). Kecamatan Tanggulangin dengan jumlah penduduk 84.580 jiwa( laki- laki 42.279 dan perempuan 42.301 jiwa). Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.989( laki- laki 24.966 dan perempuan 25.023 jiwa). Kecamatan Krian dengan jumlah penduduk 118.685( laki- laki 59.899 jiwa dan perempuan 58.786 jiwa). Kecamatan Balong Bendo dengan jumlah penduduk 66.865 jiwa( laki- laki 33.633 jiwa dan perempuan 33.232 jiwa). Kecamatan Wonoayu dengan jumlah penduduk 72.009( laki- laki 36.017 jiwa dan perempuan 35.992 jiwa), Kecamatan Tarik dengan jumlah penduduk 60.977 jiwa( laki- laki 60.977 jiwa dan perempuan 30.362 jiwa). Kecamatan Prambon memiliki jumlah penduduk 68.336 jiwa( laki- laki 68.336 jiwa dan perempuan 34.063 jiwa). Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk 212.857( laki- laki 107.256 jiwa dan perempuan 105.601 jiwa). Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk 231.298 jiwa( laki- laki 116.242 jiwa dan perempuan 115.056 jiwa). Kecamatan Gedangan dengan jumlah penduduk 132.847 jiwa( laki- laki 67.757 jiwa dan perempuan 65.090 jiwa). Kecamatan Sedati dengan jumlah penduduk 92.468 jiwa( laki- laki 46.805 jiwa dan perempuan 45.663 jiwa). Kecamatan Sukodono dengan jumlah penduduk 111.121 jiwa( laki- laki 55.936 dan perempuan 55.185 jiwa).

Dari totalitas jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tersebar dalam 18 Kecamatan bisa di tahu jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1. 945. 252, yang terdiri dari pria 977. 683 serta wanita 967. 569 jiwa. Kecamatan yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk paling tinggi merupakan Kecamatan Waru dengan jumlah 231. 298 jiwa, sebaliknya Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk sangat sedikit ialah Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49. 989 jiwa.

#### **4.1.5 Kondisi Kesehatan Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 memiliki jumlah tenaga kerja kesehatan sebanyak 5.163 orang yang tersebar di sebagian sarana kesehatan semacam, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan GFK. Berdasarkan pada profil kesehatan kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015, berikut jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo: 1. Jumlah dokter spesialis sebanyak 681 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 32, 35 dokter spesialis. 2. Jumlah dokter umum sebanyak 2.171 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 103 dokter umum. 3. Jumlah dokter gigi sebanyak 618 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 29 dokter gigi. 4. Jumlah tenaga farmasi sebanyak 613 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 10, 53 tenaga farmasi. 5. Jumlah ahli gizi dengan pendidikan D1– D4/ S1 Ahli Gizi sebanyak 41 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 2 ahli gizi. 6. Jumlah perawat sebanyak 2. 069 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 98 perawat. 7. Jumlah bidan sebanyak 681 orang, apabila dihitung rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 32 bidan.

#### **4.1.6 Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo mempunyai visi yang yakni gambaran tentang keadaan masa depan yang di idamkan oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Sidoarjo. Terdapat pula visi kabupaten Sidoarjo ialah“ MANDIRI, SEJAHTERA, Dan MADANI”. Visi tersebut dibuat dengan makna yang mempunyai jika pemerintah mempunyai harapan buat masyarakat Sidoarjo biar mampu tingkatkan keahlian diri dan daerah serta mampu mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupannya secara mandiri, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkecukuoan secara material- spiritual, sejahtera lahir dan batin, dapat memegang teguh moral agama, beradab dan berakhlak mulia, dapat menjunjung besar supremasi hukum, demokratis, tertib, aman, tentram dan damai, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki uraian hendak hak daan kewajiabnnya sebagai warga negara.

Misi Kabupaten Sidoarjo mempunyai misidengantahapan yang jelas dan berarti dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat pula misi kabupaten Sidoarjo ialah sebagai berikut:

1. Menekan masyarakat biar berperan serta dalam nilai- nilai beragama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai- nilai pancasila dengan tidak berubah- ganti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat kabupaten Sidoarjo.
3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan tujuan mendorongpeningkatan pembangunan proporsional, berwawasan zona, dan berkelanjutan.

## **4.2 Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo**

### **4.2.1 Sejarah**

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan



perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

#### **4.2.2 Visi dan Misi**

Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik, serta

unggul dalam operasional dan pelayanan. Sedangkan untuk Misi BPJS Ketenagakerjaan adalah “Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

1. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

#### **4.2.3 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan**

Filosofi BPJS Ketenagakerjaan merupakan kemandirian serta harga diri buat menanggulangi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung kepada orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua ataupun keluarganya apabila wafat dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh selaku hak serta bukan belas kasih dari orang lain. Supaya pembiayaan serta khasiatnya maksimal, penerapan program BPJS Ketenagakerjaan dicoba secara gotong royong, di mana yang muda menolong yang tua, yang sehat menolong yang sakit serta yang berpenghasilan besar menolong yang berpenghasilan rendah.

#### **4.2.4 Wilayah Kerja**

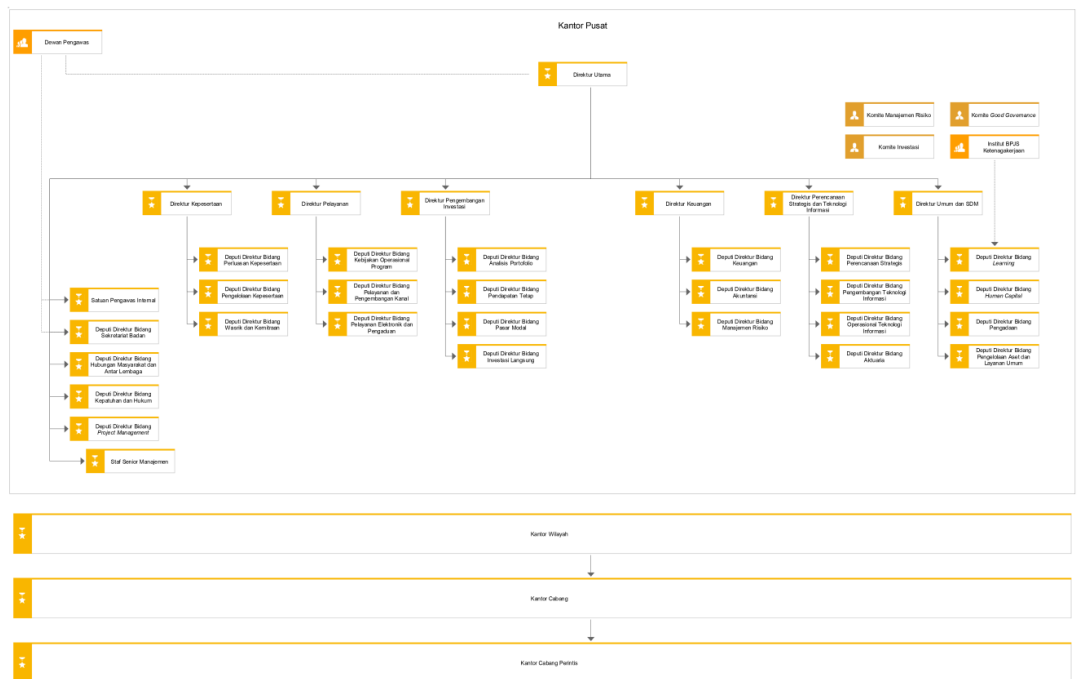
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo mempunyai wilayah kerja meliputi :

1. Kabupaten Sidoarjo : Ruko Taman Pinang Indah Blok A2 no 1-4, Jetis, Lemahputro, 61217 ( Kantor Cabang Induk).
2. Kabupaten Sidoarjo : Ruko La Diva Junction Blok A, Jalan Gubernur Sunandar, Sidomulyo, Krian, Sidotemo, 61262 (Kantor Cabang Perwakilan).

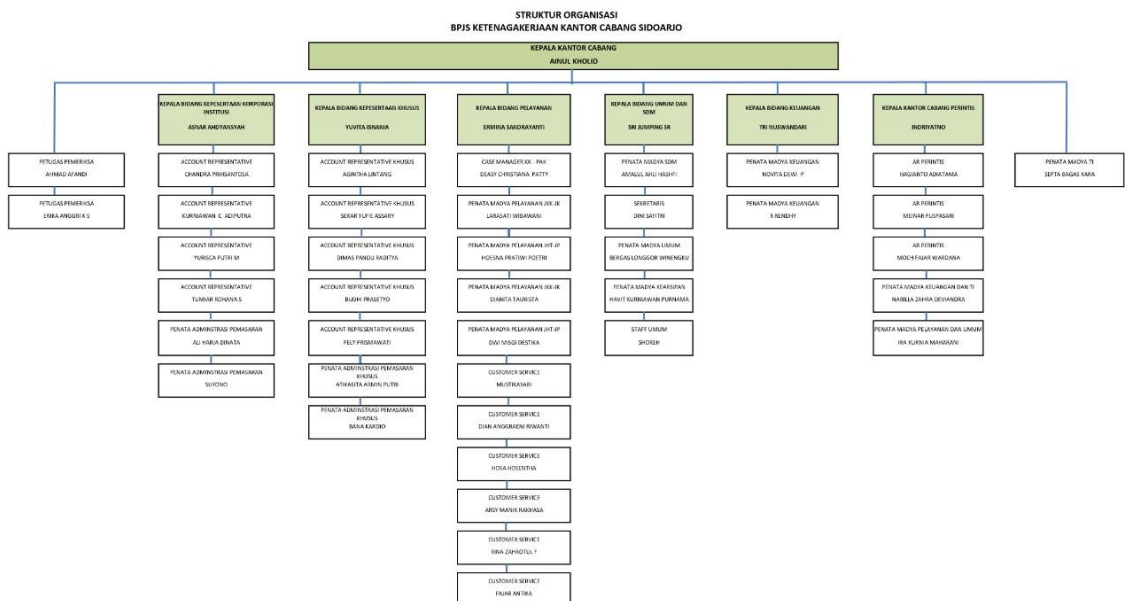
## 4.2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Bidang BPJS Ketenagakerjaan

Masing-masing instansi mempunyai struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan proses bisnis instansi tersebut. Adapun struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan pusat sebagai berikut :

**Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat**



**Gambar 4.3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo**



Ada pula tugas pokok guna dari tiap- tiap bidang di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo selaku berikut:

#### 1. Kepala Kantor Cabang

Bertugas buat memusatkan, mengevaluasi, serta mengatur aktivitas operasional di kantor cabang selaras dengan kebijakan serta strategi yang diresmikan di kantor daerah guna membenarkan pencapaian sasaran cabang serta daerah secara maksimal cocok dengan standar serta syarat yang berlaku di industri. Wewenang yang dipunyai oleh kantor cabang:

1. Membagikan persetujuan penempatan investasi dana di zona kerjanya cocok dengan batas kewenangannya
2. Merekomendasikan pembuatan kantor Cabang kelas 1 Pembantu baru
3. Merekomendasikan program PKP yang cocok dengan keadaan cabang kelas 1
4. Mengajukan usulan mutasi serta promosi pegawai di cabang kelas 1 buat diajukan ke kantor wilayah
5. Berikan persetujuan pengadaan benda serta jasa buat kantor cabang kelas 1 cocok dengan batasan kewenangannya
6. Membagikan persetujuan pembaharuan fasilitas infrastruktur teknologi informasi
7. Membagikan persetujuan pencairan anggaran rutin
8. Jadi perwakilan industri di cabang kelas 1

#### 2. Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI)

Bidang kepesertaan korporasi dan institusi dipandu oleh seseorang kepala bidang yang bertugas merancang program kepesertaan Badan Usaha ataupun penerima upah skala besar/menengah serta kepesertaan jasa konstruksi di cabang yang selaras dengan strategi kepesertaan cabang, memantau serta membina kinerja Account Representative (AR) dan mengatur pelayanan administrasi kepesertaan guna membenarkan sasaran kepesertaan penerima upah dan jasa konstruksi serta iuran di cabang tercapai dengan efisien serta efisisen. Wewenang yang dipunyai oleh Kabid Kepesertaan KSI adalah:

- a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target pencapaian kepesertaan (penambahan tk dan tk aktif ) dan iuran
- c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan AR
- d. Menentukan akun untuk setiap AR
- e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- f. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin
- g. Mengajukan usul reward/punishment untuk AR
- h. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya

### 3. Account Representative Khusus (ARK)

Bertugas menyusun usulan program kepesertaan badan usaha atau penerima upah dengan skala usaha mikro/kecil, bukan penerima upah (pekerja informal) dan membina agen PERISAI serta program yang diperuntukkan pekerja migran Indonesia (PMI). Memiliki tugas mengakuisisi kepesertaan baru baik pekerja formal maupun informal serta memberikan edukasi kepada agen PERISAI untuk dapat berhasil mengakuisisi kepesertaan dan meningkatkan penerimaan iuran cabang.

### 4. Account Representative (AR)

Bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, serta melakukan kepada pembinaan timnya guna tercapainya tertibnya administrasi, terjalinnya hubungan baik dengan peserta dan menetapkan iuran yang telah dibebankan. Fokus Account Representative (AR) adalah membina badan usaha dengan skala usaha menengah/besar atau perusahaan platinum/gold yang memiliki peran penting pada kepesertaan dan penerimaan iuran cabang. Selain itu juga melakukan akuisisi proyek melalui program jasa konstruksi.

### 5. Penata Madya Administrasi Pemasaran

Bertugas menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan kepesertaan dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi dan pencetakan kartu kepesertaan serta sertifikat

badan usaha, memastikan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan kepesertaan. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Administrasi Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta
- b. Menginput data calon peserta serta pencetakan dokumen (kartu kepesertaan dan sertifikat badan usaha)
- c. Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta
- d. Memberikan dukungan terhadap tugas ARK/AR
- e. Melakukan duplikat kartu , pemadanan data dan membantu AR/ARK dalam menjaga validitas data peserta

#### 6. Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus (KPS)

Bidang Kepesertaan Program Khusus dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas merencanakan program pemasaran formal dengan skala usaha mikro dan kecil, informal dan program khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan sektor informal di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja ARK serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan serta iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki oleh Kepala Bidang KPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun strategi tindak lanjut potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran
- c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan ARK
- d. Menentukan target untuk setiap ARK
- e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- f. Menyetujui peneluaran anggaran rutin
- g. Mengajukan usul reward/punishment ARK
- h. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya

## 7. Bidang Umum dan SDM

Bidang Universal serta SDM dipandu oleh seseorang kepala bidang yang bertugas memantau serta mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber energi manusia, pengadaan benda serta jasa, pemeliharaan aset serta pelayanan universal untuk karyawan universal semacam rumah tangga, kebersihan, keamanan serta kearsipan) dan ikatan komunikasi dengan pihak internal serta eksternal guna membagikan sokongan pada aspek SDM serta universal untuk aktivitas bisnis di kantor cabang. Wewenang yang dipunyai oleh Bidang Universal serta SDM merupakan selaku berikut:

- a. Menetapkan kandidat calon pegawai baru
- b. Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya
- c. Merekomendasikan vendor
- d. Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam batas kewenangannya
- e. Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja pegawai
- f. Mewakili perusahaan dalam penanganan masalah hubungan industrial

### a. Penata Madya SDM

Bertugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM, administrasi karyawan dan pembinaan bagi karyawan di kantor cabang sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

### b. Penata Madya Umum

Bertugas mengkoordinasi pelayanan umum dan penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan, pemeliharaan arsip, aset, sarana dan prasarana serta melakukan program komunikasi sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

## 8. Bidang Keuangan

Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memantau dan mengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di kantor cabang guna memberi dukungan pada aspek

keuangan bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan otorisasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangannya
- b. Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan

#### 9. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan dipandu oleh kepala bidang pelayanan yang yang merancang, mengkoordinasikan, memnatau serta mengevaluasi penyelenggaraan serta pelayanan program JHT, JP, JKK serta JK dan mengkoordinasi penyelesaian permasalahan terdiagnosa Musibah Kerja-Penyakit Akibat Kerja (KK- PAK) di area operasional kantor cabang guna membenarkan aktivitas pelayanan berlangsung mudah serta penuh standar mutu yang ditetapkan. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Pelayanan merupakan selaku berikut:

- a. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenagngan
- b. Menyetujui anggran rutin
- c. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya
- d. Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan

#### 10. Petugas Pemeriksa Cabang (Wasrik)

Bertugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja, membuat laporan dan mengusulkan sanksi administratif surat teguran, denda dan rekomendasi pemeberhentian pelayanan publik berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan program jaminan sosial.

### **4.2.6 Program**

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja : Memberikan perlindungan atas risiko terjadinya kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk



kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau pun sebaliknya. Serta penyakit akibat bekerja juga termasuk ke dalam kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud terdapat unsur roda paksa seperti terjatuh, tertabrak, terpeleset dsb.

2. Jaminan Kematian : Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja seperti sakit.
3. Jaminan Hari Tua : Memberikan manfaat uang tunai yang besarnya sesuai dengan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus jika peserta sudah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap ataupun sudah tidak bekerja karena resign atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
4. Jaminan Pensiun : Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun berupa sejumlah uang yang diberikan secara sekaligus jika peserta sudah memiliki masa iur jaminan pensiun kurang dari 15 tahun atau diberikan secara berkala setiap bulan apabila peserta memiliki masa iur lebih dari 15 tahun. Manfaat pensiun dapat diberikan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun (tahun ini usia 57), cacat total tetap atau diberikan ke ahli waris jika peserta meninggal dunia.
5. Kepesertaan Jasa Konstruksi : Perlindungan yang diberikan kepada pemberi kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun iuran jasa konstruksi berdasarkan dengan nilai proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK). Perlindungan pada program Jasa Konstruksi meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
6. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) : Perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang melakukan kegiatan usaha/bekerja secara mandiri

untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut. Yang termasuk dalam peserta Bukan Penerima Upah (BPU) seperti tukang ojek, pedagang keliling, asisten rumah tangga, dokter, artis dan lain-lain.